

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022

Waktu : Pukul 11:30 - Selesai

Tempat : Lab. Departemen Ilmu Sejarah

**GERAKAN PERMESTA DI SULAWESI 1957-1961 :
SEBUAH PERCOBAAN REFORMASI PERTAMA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sarjana
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin.**



Oleh :

MUH DARUL AKSA HELMI

F811 15 308

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**GERAKAN PERMESTA DI SULAWESI 1957-1961 : SEBUAH
PERCOBAAN REFORMASI PERTAMA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

MUH DHARUL AKSA HELMI

F81115308

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 5 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.


UNIVERSITAS HASANUDDIN


Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Konsultan I

Konsultan II


Dr. Suriadi Mappanara, M. Hum,
NIP. 1957091219985031003

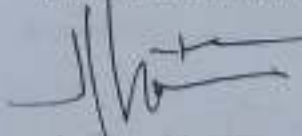

H. Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc. P.,
M. Hum
NIP. 195712191989031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Akim Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Dr. Iham, S.S., M.Hum,
NIP. 197608272008011001

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari Rabu, 29 Juni 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul

**GERAKAN PERMESTA DI SULAWESI 1957-1961 : SEBUAH
PERCOBAAN REFORMASI PERTAMA DI INDONESIA**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

Makassar, 5 Juli 2022

PANTIA UJIAN SKRIPSI

1. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum

Ketua :

2. H. Dr. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum

Sekretaris :

3. Amrullah Amir, S.S., M.A., PH.D

Penguji I :

4. A. Lili Evita, S.S., M.Hum

Penguji II :

5. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum

Konsultan I :

6. H. Dr. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum

Konsultan II :

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh Dharul Aksa Helmi

NIM : F81115308

Departemen / Program Studi : Ilmu Sejarah/ Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“GERAKAN PERMESTA DI SULAWESI 1957-1961 : SEBUAH PERCOBAAN
REFORMASI PERTAMA DI INDONESIA”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dibuktikan dengan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



MUH DHARUL AKSA HELMI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia serta rahmat-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan dan halangan. Mulai dari pencarian literatur, pengumpulan data, sampai pengolahan data dan juga tahapan penulisan. Penulis menyadari dalam hasil penulisan ini masih banyak kekurangan karena tiada manusia yang luput dari kesalahan.

Penyelesaian penulisan skripsi ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup berat sebab tidak hanya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, melainkan juga membutuhkan ketekunan, ketabahan dan tentunya kesabaran guna menyelesaikannya. Tulisan ini juga merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar "*Sarjana*" selama kurang lebih tujuh tahun berupaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dibangku perkuliahan Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Penulispun dalam proses penulisan sangat dibantu oleh banyak pihak dalam menyelesaikan penulisan ini, terutama dari pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum** selaku pembimbing satu dan Bapak **Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.p., M.Hum** selaku pembimbing dua yang telah dengan sabar serta ikhlas membimbing dan membantu banyak penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta keikhlasan, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor dan para jajarannya.
2. Bapak Prof. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan para jajarannya.
3. Bapak Dr. Ilham, S.S, M.Hum., selaku ketua departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Sekretaris Departemen Ibu A. Lili Evita, S.S., M.Hum., staf pengajar Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D., Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum., Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., Nasihin, S.S., M.A., Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A., Dr. Bambang Sulistiyo Edy P, M.S., Alm. Prof. Rasyid Asba, M.A., dan Alm. Margriet Moka Lappia, S.S, M.S., yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta ilmu yang telah diajarkan kepada penulis sejak pertama kali menyandang status mahasiswa sampai penyelesaian studi serta kepala kesekretariatan Udji Usman, S.Sos.
4. Ucapan terimakasih juga kepada kedua orang tua saya Ir. Helmi dan Ir. Sartina, yang telah memberikan bantuan yang sangat besar dan kesabaran yang tak terhitung hingga penulis bisa menyelesaikan masa studinya. Tidak

lupa pula kepada saudari tercintaku Elsa W. Novianti Helmi S.KM., yang turut memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis semasa kuliahnya.

5. **Teman-teman angkatan 2015** yang banyak memberikan dorongan untuk bisa menyelesaikan masa studi penulis dan menemani penulis semasa kuliah. Teman-teman seperjuangan Fitrah, Arul, Putra, Yuli, Idhar, Ria, Suci, Suke, Ibe, Afif, Cici, Fitri, Mudrika, Isnaeni, Isna, Alip, Gama, Leha, Mila, Sahriana, Apriadi, dan Selvi.
6. **Keluarga Besar HUMANIS** yang selalu menjadi wadah, dan pembinaan berbagai Pengetahuan Sejarah, Pengalaman Organisasi, suka dan duka sebagai Mahasiswa, serta menumbuhkan karakter. Bantuan serta pengalaman yang sangat besar dari senior-senior serta junior tidak akan penulis lupakan.
7. **Rebaxmi** yang selalu menjadi tempat pengetikan skripsi selama masa penulisan penulis. Bantuan yang sangat besar dari Michael dan Andi Fajrin kopi gratisnya dan tutup lebih lambat untuk menemani penulis menyelesaikan penulisannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat menerima kritik yang sifatnya membangun dan mengarah kepada penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 5 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	10
1.2.1 Batasan Masalah	10
1.2.2 Batasan Temporal	10
1.2.3 Batasan Spasial	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Metode Penelitian	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Penelitian	14
1.5.2 Manfaat Penelitian	14
1.6 Tinjauan Pustaka	16
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN POLITIK DAN TOKOH-TOKOH PERMESTA	20
2.1 Gambaran Politik Sulawesi Selatan	20
2.2 Tokoh-Tokoh Yang Terlibat Dalam Permesta	25

2.2.1 Herman Nicholas Ventje Sumual	26
2.2.2 Mohammad Saleh Lahade,	27
2.2.3 Andi Pangerang Pettarani	28
2.2.4 Andi Muhammad Jusuf Amir	29
2.2.5 Alex Evert Kawilarang	30
2.2.6 Henk Rondonuwu	30
BAB III PIAGAM PERMESTA	32
3.1 Menjelang Permesta	32
3.1.1 Faktor Utama Bulatnya Gerakan	37
3.1.2 Perencanaan Sipil dan Militer.....	39
3.2 Proklamasi Permesta	44
3.2.1 Reaksi Di Awal Proklamasi Permesta	47
3.2.2 Isi Perjuangan Permesta.....	50
BAB IV PERMESTA Di Sulawesi Selatan 1957-1961	56
4.1 Permesta Di Sulawesi Selatan Sebelum Pemindahan	56
4.1.1 Pemindahan Pusat Gerakan Permesta.....	60
4.1.2 Permesta Di Sulawesi Selatan Setelah Pemindahan	65
4.2 Permesta Sebagai Jalan Damai Atau Perang	74
BAB V KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Muh Dharul Aksa Helmi, F81115308, “Gerakan Permesta di Sulawesi 1957-1961 : Sebuah Percobaan Reformasi Pertama di Indonesia”, bimbingan oleh Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. dan Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.P, M.hum

Karya tulis ini akan membahas tentang bagaimana pergerakan Permesta yang sebelumnya telah dikenal sebagai sebuah pemberontakan daerah dan mengangkat perspektif lain dari pergerakan tersebut. Pada periode 1950-an kondisi Indonesia yang tidak stabil dan di usianya yang masih sangat muda membuat Indonesia menjadi negara yang masih rentan. Permesta sendiri sebagai sebuah percobaan reformasi pertama di Indonesia membahas bagaimana konsep ide penghapusan sentralisasi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat pada masa itu.

Dalam menyusun penulisan ini, penulis menggunakan metode sejarah yaitu pencarian sumber atau heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Di masa pemerintahan Soekarno tahun 1950-an pasca periodisasi Negara Indonesia Timur terjadi banyak persoalan baik dari segi militer hingga politik di Republik Indonesia. Perkara tersebut membawa dampak besar ke berbagai daerah di Indonesia, pandangan daerah pun terhadap pemerintah pusat pada saat itu dinilai kurang memperhatikan daerah dikarenakan sistem pembangunan Indonesia pada masa itu dinilai bersifat sentral. Proklamasi Permesta kemudian lahir pada 2 Maret 1957 guna menjadi solusi untuk lepas dari problem sentralisasi menuju desentralisasi, berbagai tuntutan yang diberikan Permesta kepada pemerintahan pusat pada masa itu menjadi sebuah kajian menarik menurut penulis. Pemerintahan daerah serta Militer mendukung penuh proklamasi Permesta di awal-awal pergerakan karena luka sosial yang terhimpun pada masa itu dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Permesta menjadi gerakan percobaan perombakan sistem pemerintahan pusat kemudian melahirkan dinamika-dinamika sosial yang dapat menjadi referensi melihat bagaimana sebuah percobaan reformasi pertama di Indonesia.

Kata Kunci: Permesta, Militer, Politik, Reformasi, Desentralisasi, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Muh Dharul Aksa Helmi, F81115308, “The Permesta Movement in Sulawesi 1957-1961: A First Reform Experiment in Indonesia”, guidance by Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum. and Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.P, M.hum

This paper will discuss the Permesta movement which was previously known as a regional rebellion and raises another perspective of the movement. In the 1950s, Indonesia's unstable condition and its young age made Indonesia a vulnerable country. Permesta itself, as the first reform experiment in Indonesia, discussed how the concept of the idea of abolishing development centralization was applied by the central government at that time.

In compiling this paper, the writer uses historical methods, namely source search or heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. During the Sukarno administration in the 1950s, after the periodization of the State of East Indonesia, there were many problems, both military and political, in the Republic of Indonesia. This case had a big impact on various regions in Indonesia, even the regional views on the central government at that time were considered less concerned about the regions because Indonesia's development system at that time was considered central. The Permesta proclamation was then born on March 2, 1957 in order to be a solution to escape from the problem of centralization to decentralization, the various demands that Permesta gave to the central government at that time became an interesting study according to the author. The regional government and the military fully supported the Permesta proclamation at the beginning of the movement because the social wounds accumulated at that time were felt by various layers of society. Permesta became an experimental movement to reform the central government system and then gave birth to social dynamics that could be used as a reference to see how the first reform attempt was made in Indonesia.

Keywords: Permesta, Military, Politics, Reform, Decentralization, Regional Autonomy

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang berat. Permasalahan itu antara lain, kembalinya Belanda pada 23 Agustus 1945, Pembantaian Westerling Desember 1946, Perjanjian Linggarjati 1946, Proklamasi Negara Pasundan 1947, Agresi Militer Pertama, Perjanjian Renville 1948 dan peristiwa-peristiwa lainnya. Permasalahan itu akhirnya selesai ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara, namun belum termasuk Irian Jaya didalamnya.

Banyaknya rangkaian peristiwa di awal kemerdekaan Indonesia, negeri ini mengalami masa-masa yang sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan dari Belanda pada 27 Desember 1949.¹ Selanjutnya, pemerintah harus berupaya untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dipecah belah oleh Belanda.

Selama revolusi nasional Indonesia tahun 1945-1949, peran yang dimainkan oleh para pejuang yang berasal dari Sulawesi Selatan sangat menonjol. Daerah ini menjadi tempat perlawanan terhadap kembalinya pemerintahan Belanda yang sengit di luar Republik dan bersamaan dengan itu menjadi pusat Negara

¹. M.C Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 350.

Indonesia Timur (NIT), sebuah negara yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang dibuat oleh Belanda.²

Negara Indonesia Timur (NIT) diproklamasikan pada bulan Desember 1947 di tengah-tengah kampanye pasifikasi yang dilancarkan Belanda, berhasil diterima oleh Republik pada bulan Maret 1947 dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati. Hasil Perjanjian Linggarjati itu sendiri mengakibatkan kekuasaan Republik Indonesia (RI) secara *de facto* hanyalah Pulau Jawa, Madura, dan Sumatra.³ Perjanjian itu selanjutnya menetapkan bahwa RI, Kalimantan, Indonesia Timur, akan dimasukkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan menjadi anggota Uni Indonesia Belanda.

Akhirnya, pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kelima pada tanggal 17 Agustus 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun Revolusi secara resmi dihapuskan.⁴ RIS, dengan RI sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur serta Indonesia Timur digantikan oleh suatu Republik Indonesia yang baru, yang memiliki konstitusi kesatuan (namun masih bersifat sementara). Revolusi politik ini telah selesai, namun masih tetap ada banyak persoalan pasca Revolusi ini. Patut kita apresiasi perjuangan para tokoh nasional yang telah berjuang mempertahankan Indonesia hingga

². Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 212.

³. Audrey R. Kahin, *op.cit.*, hlm. 225.

⁴. M.C Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 352.

mempersatukan kembali pasca terpecahnya wilayah-wilayah Indonesia menjadi negara federal.

Pasca Revolusi 1945-1950 Indonesia tidak langsung tenang dengan selesainya persoalan di atas. Indonesia kemudian di perhadapkan dengan persoalan politik yang kian menyuram, dapat kita lihat dengan yang terjadi sepanjang tahun 1950-1957. Pada waktu itu, percobaan demokrasi mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan dan banyak harapan-harapan yang ditimbulkan oleh Revolusi digagalkan.⁵

Pada tahun 1954-1955 krisis berlarut-larut terjadi pada kubu militer yang mengakibatkan runtuhnya sistem politik parlementer. Partai-partai politik pun makin terpolarisasi dalam pembagian Jawa-luar Jawa dan birokrasi tidak begitu efektif, maka pihak tentara yang seharusnya menjaga kesatuan pemerintahan nasional. Pada tanggal 20 Juli 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1956 Soekarno dalam pidatonya meminta agar partai-partai dibubarkan. Keluarnya *statement* seperti itu dari Soekarno membuat banyak pertentangan dalam dunia perpolitikan di Indonesia kala itu. Banyak pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1950-1957 mengakibatkan lahirnya gerakan-gerakan dalam upaya pengamanan daerah masing-masing di wilayah Indonesia.⁶

⁵. *Ibid.*, hlm. 355.

⁶. *Ibid.*, hlm. 355-386.

Sebelum proklamasi PERMESTA 2 Maret 1957, Andi Pangerang selaku Gubernur Sulawesi menghadap ke pemerintah pusat guna melaporkan situasi genting yang terjadi di Indonesia Timur. Setelah itu, Andi Pangerang Pettarani menuntut pula untuk diberi otonomi seluas-luasnya sesuai dengan UUD Sementara. Andi Pangerang juga meminta diberi uang modal sebesar Rp.350 juta untuk membiayai pembangunan Sulawesi dalam tahun 1957. Terakhir, hal yang dituntut oleh Andi Pangerang ialah pendapatan daerah, termasuk yang berasal dari kopra, dibagi menurut perimbangan 70% untuk daerah : 30% untuk pusat.⁷

Pada tanggal 2 Maret 1957, sekitar lima puluh orang berkumpul dalam suatu pertemuan yang dibuka secara resmi pukul tiga subuh oleh Komandan Tentara Teritorium VII (TT-VII) Wirabuana Herman Nicolas Ventje Sumual atau biasa disingkat menjadi H.N.V Sumual atau Sumual saja dalam penulisan ini kedepannya. Pertemuan itu dihadiri oleh orang-orang sipil terkemuka di Makassar. Pada pertemuan itu H.N.V Sumual membacakan proklamasi keadaan darurat perang untuk Indonesia Timur. Setelah pembacaan proklamasi, Saleh Lahade kemudian membacakan Piagam perjuangan semesta (Permesta), istilah semesta itu dipilih untuk menunjukkan bahwa perjuangan itu meliputi semua bidang dan wilayah.⁸

⁷. Andi Mattalatta, *Meniti Siri dan Harga Diri* (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2003), hlm. 623.

⁸. Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1989), hlm. 69.

Pada kondisi awal-awal Permesta ini Indonesia dalam status keadaan darurat perang. Panglima tertinggi dari gerakan ini ialah H.N.V Sumual dan Saleh Lahade sebagai kepala staf, juga dibantu oleh staf pemerintah militer, staf pribadi, tim asistensi dan Dewan Pertimbangan Pusat (DPP). Kemudian dibentuk pula empat gubernur militer yang bertanggung jawab kepada Sumual sebagai administrator militer. Empat militer itu ialah yang pertama dari Sulawesi Selatan dan Tenggara Andi Pangerang Pettarani, mulanya Gubernur Sulawesi Selatan. Yang kedua Sulawesi Utara Mayor D.J Somba, mulanya Komandan Resimen Infanteri 24 Manado. Ketiga Maluku dan Irian Barat, Letnan Kolonel Pietersz mulanya komandan Resimen Infanteri 25 Ambon dan keempat Nusa Tenggara Letnan Kolonel Minggu, mulanya komandan Resimen Infanteri 26 Bali.⁹

Selanjutnya dibentuk pula Komando Sulawesi Selatan dan Tenggara (KoSSST) yang dipimpin oleh Andi Mattalatta dan bertanggung jawab kepada Tentara Teritorium VII. Jalannya Perjuangan Permesta itu, mendapat banyak tekanan-tekanan dari pihak KoDPSST (Komando Pengamanan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara).

Pada bulan Juni 1957, Panglima tertinggi H.N.V Sumual pindah ke Sulawesi Utara. Secara tidak langsung hal ini banyak membawa pengaruh karena pindahnya Panglima tertinggi Permesta mengakibatkan berpindah tempatnya pula markas besar dari gerakan Permesta ini. Sumual menetapkan markas Permesta di Desa Kinilow, Sulawesi Utara. Pindahannya Permesta ke Desa Kinilow

⁹. Barbara Sillars Harvey, *op.cit*, hlm. 71.

mengakibatkan kemerosotan gerakan Permesta di Makassar. Hal yang mengakibatkan dari pindahnya H.N.V Sumual dari Makassar adalah akibat dari perubahan Tentara Teritorium VII (TT-VII) dan Komando Pengamanan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara (KoDPSST) menjadi empat KDM antara lain Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDM-SST).

KDM-SST dibentuk secara resmi pada tanggal 1 Juni 1957.¹⁰ Yang menjadi komandan KDM-SST adalah Letnan Kolonel Andi Mattalatta dan Mayor Hertasning sebagai kepala staf. Dalam momentum ini Andi Mattalatta menyetujui untuk peletakan tanggung jawab persoalan daerah Sulawesi kepada rakyat. Dia juga menyerukan perdamaian dan kemajuan bukan mempertajam pertentangan.

Setelah KDM-SST dibentuk secara resmi, maka pada tanggal 8 Juni 1957 sebuah upacara pembubaran TT-VII dan KoDPSST dilaksanakan di Makassar.¹¹ Kemudian tanggung jawab mengenai keamanan di Indonesia Timur ditangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sejak pembubaran TT-VII dan pemindahan Sumual dari Komando Indonesia Timur tersebut menimbulkan suatu reaksi di Sulawesi Utara. Reaksi tersebut disampaikan oleh Mayor Somba pada 13 Juni 1957. Mayor Somba mengatakan ia akan selalu mendukung Sumual sebagai panglima TT-VII dan mengulangi pernyataan pada tanggal 8 Mei 1957 mengenai pembubaran TT-VII.

¹⁰. Arsip Nasional Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, koleksi 'Provinsi Sulawesi Tgl/Thn. 1957-1958, registrasi nomor 335.

¹¹. Barbara Sillars Harvey, *op.cit*, hlm. 86

Pembentukan KDM (Komando Daerah Militer) pada empat bagian di Indonesia Timur menyebabkan perkembangan Permesta di Indonesia Timur mengalami kemunduran, kecuali di Sulawesi Utara. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan Sulawesi Utara tetap berada di belakang dan atau sejalan dengan Permesta. Pertama, masyarakat Minahasa merasakan suatu kemajuan yang dicapai Permesta. Kedua, para pemimpin militer di wilayah Sulawesi Utara tidak mudah digoyahkan dalam masalah likuidasi TT-VII Wirabuana.¹²

Semua staf TT-VII khususnya orang-orang Minahasa yang mendampingi Sumual selama di Makassar ikut pindah ke Manado. Ada Pula yang ikut dengan Somba karena tidak menerima dengan adanya pembubaran TT-VII. Sifat organisasi politik dan massa di Sulawesi Utara mendukung penuh gerakan Permesta kecuali partai PKI dan PNI serta ormas-ormasnya.¹³

Permesta sebagai sebuah gerakan yang dimaksudkan oleh penulis dalam judul tulisan adalah, Permesta sebagai sebuah bentuk sikap terhadap ketidakpuasan dari berbagai daerah di luar Jawa dalam hal ini Sulawesi terhadap pola kebijaksanaan ekonomi politik yang dijalankan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Gerakan daerah ini menuntut agar mereka yang berkuasa di pemerintahan pusat untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah untuk mengatur dan membangun daerahnya masing-masing.

¹². R.Z Leirissa, *PRRI Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Grafiti Press, 1991), hlm 122.

¹³. *Ibid.*, mengenai perilaku politik mengacu pada Mary Grisezkweif dan Robert W. Kweit, *Konsep dan Metode Analisa Politik*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm 127.

Otonomi daerah menjadi topik utama dalam capaian yang diinginkan oleh Permesta. Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Secara harfiah otonomi merupakan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Dalam aturan pemerintah di Indonesia otonomi daerah termaktub dalam UUDS 1950 pasal 135 ayat 1, hal inilah yang menjadi acuan gerakan Permesta dalam menuntut keseimbangan otonomi daerah dalam mengelola daerah masing-masing.

Dalam satu sesi pembicaraan penulis menemukan sebuah penyampaian informasi terkait Permesta ini yang bersumber dari Abdul Rasyid Asba, beliau mengemukakan bahwa salah satu faktor besar yang menjadi pokok utama lahirnya Gerakan Permesta ini disebabkan adanya komparasi pendapatan daerah di Sulawesi yang sebelum berakhirnya periode NIT lebih baik dibandingkan pasca bergabungnya kembali ke NKRI.

Perbandingan ini bisa hadir karena pada saat Indonesia timur masih menjadi Negara federal, pendapatan yang dihasilkan NIT pada saat itu bisa mencapai 40%, namun pada saat kembali bergabung menjadi kesatuan republik Indonesia, pendapatan dari daerah ini hanya 8% hal ini dikarenakan peraturan pemerintah pusat yang bisa dibilang sangat egois karena hanya mementingkan pemerintah pusat.

Hal inilah yang menjadi salah satu pokok utama bahwa dalam gerakan Permesta memang benar hanya sebuah gerakan penuntutan hak dan bukanlah sebuah pemberontakan.

Dengan banyaknya rentetan persoalan yang penulis telah dijelaskan diatas, penulis melihat ada banyak hal yang perlu diuraikan lebih lanjut sehubungan dengan diproklamasikannya Permesta di Sulawesi Selatan. Kemudian, penulis juga melihat banyak keganjilan dalam klaim pemerintah pusat dalam menilai gerakan Permesta ini, sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh terkait peristiwa ini. Dari banyaknya pokok-pokok bahasan tersebut telah membentuk minat penulis untuk mengkaji masalah Gerakan Permesta di Sulawesi 1957-1961 :
Sebuah Percobaan Reformasi Pertama di Indonesia

1.2 Batasan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis hendaknya melakukan pembatasan terhadap objek kajiannya. Batasan masalah dalam penelitian sejarah sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu batasan temporal (batasan waktu) serta batasan spasial (batasan tempat/wilayah). Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian penulis tidak terlalu melebar dan tetap dalam konteks pembahasan utama penulis. Pada penelitian ini yang akan menjadi fokus utama penulis ialah apakah benar Permesta sebagai sebuah pemberontakan atau Permesta ini sebagai bentuk gerakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah pada tahun 1957-1961.

1.2.2 Batasan Temporal

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada tahun 1957-1961 yang dimana pada waktu itu, terjadinya Gerakan Permesta yang diproklamasikan pada 2 Maret 1957 di Makassar. Penulis membatasi pembahasan ini hingga pada tahun 1961 dikarenakan secara resmi Gerakan Permesta dibubarkan. Penulis juga akan membahas lebih lanjut mengenai dampak saat terjadinya Gerakan Permesta yang berakhir pada tahun 1961 yang sebagaimana bisa kita lihat bahwa gerakan ini membawa banyak pengaruh pada wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Sulawesi Utara.

1.2.3 Batasan Spasial

Batasan spasial atau batasan wilayah pada penelitian ini adalah di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara, dimana dalam Gerakan Permesta ini Sulawesi Selatan merupakan tempat diproklamasikannya Gerakan Permesta ini. Gerakan ini pula berlangsung lama di Sulawesi Utara yang dikarenakan dipindah tempatkannya H.N.V Sumual selaku pimpinan gerakan ini ke Manado, penulis juga setidaknya akan membahas wilayah Sulawesi Utara dikarenakan selama berlangsungnya gerakan tersebut di Manado sudah tentu membawa banyak pengaruh pada Sulawesi Selatan. Gerakan ini masih memiliki pengaruh yang besar saat berpindah ke Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan masih banyak tokoh Permesta yang berlatar belakang Sulawesi Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Setiap gerakan pasti memiliki peranan yang besar untuk sebuah wilayah, baik itu dari aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Sama halnya dengan Permesta sudah tentu pasti Permesta memiliki peranan besar bagi wilayah yang ditempatinya pada masa itu. Untuk menghindari banyaknya aspek yang meluas, penulis hanya mengkaji persoalan utama yaitu :

1. Bagaimana Permesta sebagai gerakan penuntutan hak otonomi daerah bisa dinilai sebagai sebuah pemberontakan, padahal gerakan ini merupakan suatu gerakan reformasi pertama di Indonesia?

2. Bagaimana Permesta menjaga konsistensi tujuan dalam berjalannya gerakannya?

Dari satu pokok permasalahan tersebut penulis akan membahas banyak hal yang menjadi aspek-aspek penting dari gerakan Permesta, sehingga nantinya bisa memberi sudut pandang baru terkait gerakan Permesta bukanlah sebuah pemberontakan melainkan hanya sebuah gerakan kritik total terhadap pemerintah.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mana penulis mengumpulkan data untuk menarik satu kesimpulan dari kejadian masa meskipun terdapat banyak jenis kajian sejarah, akan tetapi tetap menggunakan metode penelitian yang sama. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Sejarah” Kuntowijoyo memaparkan beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, dan yang terakhir adalah penulisan.¹⁴

Pengumpulan Sumber atau *Heuristik*, sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan ditulis/diteliti oleh penulis. Karena penelitian ini bertemakan sejarah maka dari itu penelitian dari penulis ini bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu, maka dari itu penulis mencari sumber dan data melalui arsip dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan topik penulis. Sejauh ini penulis telah melakukan pencarian sumber dengan mengunjungi Perpustakaan, Laboratorium Sejarah, dan juga mencari sumber dengan membaca jurnal-jurnal

¹⁴. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 67.

yang tersedia di Internet. Dalam proses pencarian sumber ini penulis menemukan banyak sudut pandang yang berbeda dengan peristiwa Gerakan Permesta ini, mulai dari menyatakan bahwa Gerakan Permesta ini adalah sebuah gerakan separatis hingga menganggap gerakan ini hanya sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah pusat di Jakarta pada saat itu.

Selanjutnya penulis melakukan kritik sumber atau verifikasi yang dimana ini adalah tahap kedua dalam melakukan penelitian sejarah. Disini penulis akan mengolah data dan dokumen yang didapatkan dan akan dilakukan kritik terhadap data-data tersebut untuk memastikan keabsahannya. Seperti yang penulis tadi katakan, dengan banyaknya sudut pandang yang saling berlawanan mengharuskan penulis untuk mengkritik sumber-sumber yang penulis temukan.

Setelah penulis melakukan kritik sumber atau verifikasi sumber-sumber yang penulis temukan, selanjutnya penulis akan melakukan interpretasi atau penafsiran merupakan tahap ketiga dari metode penelitian sejarah. Pada tahap ini sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sesuai dengan yang dibutuhkan penulis dalam menunjang penelitiannya.

Terakhir penulis akan melakukan historiografi atau penulisan yang merupakan tahap akhir dari tahap penelitian sejarah. Dimana tahap ini adalah tahap peneliti menafsirkan hasil analisis dari sumber-sumber yang digunakan. Dikarenakan ini adalah penelitian sejarah maka dari itu penulis diarahkan untuk melakukan penelitian, mengungkapkan, dan menjelaskan peristiwa masa lalu sehingga jelas diarahkan kepada metode sejarah yang bersifat kualitatif.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sudah tentu penulis memiliki tujuan dan manfaat dalam menulis karya skripsi ini adapun tujuan dan manfaatnya ialah :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sudut pandang lain dari Gerakan Permesta yang diklaim oleh pemerintah bahwa itu merupakan sebuah pemberontakan terhadap pemerintah pada orde lama.
- b. Untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait Gerakan Permesta di Sulawesi Selatan selama masa pergerakannya.
- c. Untuk mengetahui peran Permesta dalam pembangunan wilayah otonomi daerah.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk pendidikan dan masyarakat umum ,karena tulisan ini nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan dengan sudut pandang lain untuk peneliti lainnya.
- b. Memberikan informasi baru terkait Gerakan Permesta yang notabenenya diketahui oleh masyarakat umum sebagai sebuah pemberontakan.
- c. Menyampaikan dampak besar dari adanya Gerakan Permesta baik itu dalam skala kecil maupun besar.

- d. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S1 di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sejarah Indonesia Modern adalah buku yang sangat penting dalam penelitian ini. Dalam buku ini M.C Ricklefs menjelaskan tentang bagaimana keadaan Indonesia mulai awal kedatangan islam kurang lebih tahun 1300 hingga zaman orde baru. Dalam buku ini penulis banyak mendapat data yang dapat digunakan karena dalam buku ini penjelasan terkait awal kemerdekaan hingga pecahnya proklamasi Permesta 1957 dimulai terdapat dalam buku ini.

Dalam buku ini pula banyak menjelaskan terkait kondisi Indonesia diawal-awal kemerdekaan yang merupakan salah satu faktor dimana banyaknya pemberontakan terjadi di Indonesia pada tahun 1945-1950.

Penulis juga mengambil dari buku yang berjudul **Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan**. Buku ini ditulis oleh Audrey R.Kahn pada tahun 1985 dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pada tahun 1990. Dalam buku ini menceritakan lebih mendetail terkait kondisi Indonesia diawal kemerdekaannya hingga peralihan dari orde lama ke orde baru.

Buku ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, karena penjelasan terkait kondisi Indonesia Timur pada masa itu lebih mendetail sehingga menambah data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan.

Penulis juga menggunakan buku **Meniti Siri dan Harga Diri** yang ditulis oleh Andi Mattalatta. Dalam buku ini penulis menemukan kronologis lebih mendetail terkait faktor-faktor diproklamasikannya Permesta 2 Maret 1957 di Makassar. Dalam buku ini penulis melihat Andi Mattalatta selaku penulis dari buku

ini, menggunakan sudut pandangnya pribadi ditunjang dengan data-data pribadi yang dimilikinya. Buku ini membantu banyak penulis dalam menyusun latar belakang penelitian ini, karena banyak hal yang lebih teknis dijelaskan oleh Andi Mattalatta.

Penulis juga menggunakan buku **Pemberontakan Setengah Hati** yang ditulis oleh Barbara Sillars Harvey. Cetakan kedua diterbitkan oleh PT Pustaka Grafiti, Jakarta 1986. Dalam buku ini penulis melihat bahwa Harvey mencoba untuk merekonstruksi kembali sebab-akibat dari peristiwa Permesta dengan mengulasnya dari skala nasional hingga lokal, dan banyak memberikan gambaran mengenai jalannya pertempuran-pertempuran antara pihak TNI dan Permesta

R.Z Leirissa mengemukakan tulisannya yang berjudul **PRRI Permesta Sebagai Suatu Strategi Membangun Tanpa Komunis**. Leirissa mencoba untuk memahami Permesta dari pertanyaan mengapa timbul Permesta. Yang pada intinya adalah berpangkal pada dewan-dewan dan Permesta memperlihatkan adanya suatu gagasan orisinal mengenai pembangunan nasional yang dilandasi oleh suatu nilai perjuangan. Ditambah lagi dengan banyaknya bahan literatur-literatur yang nantinya akan diolah untuk menjadi tulisan dalam karya tulis penulis ini.

Penulis juga menggunakan buku skripsi **Gerakan Permesta di Sulawesi Utara 1957-1961** yang ditulis oleh Rafika Z. Dalam skripsi ini penulis melihat pembahasan Permesta yang dominan selama di Sulawesi Utara. Dimulai pada awal Juni 1957 pindahnya H.N.V Sumual pindah ke Sulawesi Utara tepatnya di daerah kinilow. Keterkaitan antara PRRI dan Permesta juga dibahas dalam skripsi ini

hingga berakhirnya gerakan Permesta dengan membuat pernyataan secara tertulis bahwa mereka menyerah tanpa syarat.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab akan merekonstruksi peristiwa Permesta di Sulawesi. Dalam bab-bab tersebut akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, begitu pula dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek kajian dan juga metode yang dipergunakan dalam menyusun karya tulis ini. Pada intinya, bab ini menguraikan alasan-alasan yang menjadikan pentingnya tema ini untuk dikaji sebagai suatu karya ilmiah.

Kemudian pada Bab 2 penulis akan memberikan penggambaran terkait kondisi politik di masa sebelum diproklamasikannya Permesta serta pengenalan terkait tokoh yang berperan dalam gerakan Permesta dari tokoh militer, sipil, dan juga pemerintah daerah. Sehingga dari pembahasan inilah kita bisa gambaran awal untuk merekonstruksi ulang peristiwa lahirnya Permesta pada tahun 1957.

Selanjutnya pada Bab 3 penulis akan menguraikan tentang lahirnya Permesta sebagai perjuangan hak otonomi daerah. Dalam Gerakan Permesta ini dapat kita lihat sebagai sebuah percobaan reformasi pertama di Indonesia, sebagaimana bila kita tinjau dari perjuangan yang ingin dicapai oleh Permesta itu sendiri adalah hak otonomi daerah.

Setelah itu pada Bab 4 penulis akan menguraikan bagaimana Permesta di Sulawesi Selatan di awal proklamasi Piagam Permesta, hingga kondisi gerakan Permesta di Sulawesi Selatan pasca pemindahan pusat gerakan Permesta ke Sulawesi Utara. Dalam bab ini pula teruraikan akhir dari perjalanan dari gerakan Permesta.

Terakhir penulis akan merancang Bab 5 yaitu kesimpulan, dalam bab ini penulis akan merampung seluruh jawaban atas penelitian yang telah ramu dalam rumusan masalah sehingga tulisan selesai sebagai tugas akhir dari sang penulis.

BAB II

GAMBARAN POLITIK DAN TOKOH-TOKOH PERMESTA

“Gambaran Politik dan Tokoh-tokoh Permesta menjadi sebuah pengantar sebelum melanjut pada bab berikutnya. Dalam bab ini akan membahas terkait kondisi politik di Sulawesi Selatan yang menjadi benih-benih dari konsep lahirnya Permesta sebagai sebuah perjuangan dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan Permesta serta peran yang tokoh tersebut mainkan dalam gerakan”.

2.1 Gambaran Politik Sulawesi Selatan

Politik di Sulawesi Selatan bisa kita lihat mengalami persoalan dualisme, yaitu sistem pemerintahan modern dan juga sistem pemerintahan tradisional. Fenomena ini seringkali disebut dengan sistem pemerintahan bermuka dua dikarenakan terbentuknya sebuah sistem administrasi yang modern dan impersonal yang berbenturan dengan realitas lapangan yang masih kental diwarnai sistem kekuasaan yang bersifat tradisional dan sangat personal.

Sejak awal kemerdekaan prinsip dualism itu terus berlangsung hingga sampai pada tahun 1950-an. Berakhirnya Negara Indonesia Timur sebagai sebuah sistem federasi membawa Indonesia menjadi negara yang mengadopsi prinsip unitaris. Daerah-daerah di luar seperti Sulawesi dan daerah-daerah lainnya disatukan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia Timur pada masa pengembalian ke dalam NKRI mengalami kemerosotan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan infrastruktur. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan yang menumpuk di daerah Sulawesi.

Kebutuhan-kebutuhan pembangunan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi persoalan di dalam daerah pasalnya pasca pengembalian Indonesia Timur kedalam NKRI membawa komparasi yang sangat jelas dalam bidang perekonomian, di masa NIT pendapatan daerah di Sulawesi Selatan bisa mencapai 40% sedangkan pasca kembalinya Indonesia Timur kedalam NKRI hanya mencapai 8%, bisa kita amati dengan perbandingan tersebut tentu membawa pengaruh besar bagi daerah Sulawesi dengan kebijakan pemerintah pusat seperti itu. Kebijakan dari pemerintah pusat terus berlangsung dan perlahan-lahan menjadi luka sosial di daerah Sulawesi.

Dalam ranah politik pada Pemilihan umum pada tahun 1955 juga menjadi pergolakan yang menarik untuk menjadi pengaruh dalam kondisi politik di Sulawesi Selatan. Pemilu 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pemilu 1955 dilakukan dalam dua tahap yang dimulai pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955.¹

Dalam berjalannya Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan sendiri tidak berjalan dengan mulus, masih masifnya gerakan-gerakan yang kontra dengan Pemerintah Pusat juga masih berlangsung yang mengakibatkan persoalan tersebut. Gerakan Darul Islam salah satunya, Kahar Muzakkar selaku pemimpin gerakan tersebut mengintimidasi para pemilih di Sulawesi Selatan seperti memberikan ancaman dan

¹. Mudanto S.S, *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019), hlm. 13.

beberapa hal diculik. Dan juga seluruh pemilih yang mendaftarkan diri akan di denda.

Walaupun adanya tuntutan dan intervensi dari Gerakan Darul Islam maupun Tentara Kemerdekaan Rakyat yang menuntut pengakuan sebagai kesatuan Tentara biasa sebelum membolehkan orang memberikan suaranya, namun pemilihan umum 1955 tersebut tetap berhasil dilakukan.²

Jumlah orang yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR pada bulan September 1955 sangat banyak. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5 persen dari para pemilih terdaftar. Walaupun pasti banyak pemilih yang memberikan suara sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh para pemimpin keagamaan, para kepala desa, para pejabat, para tuan tanah, atau para atasan lainnya, bagaimanapun juga, pemilihan umum nasional ini penting sekali dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum tersebut menawarkan pilihan yang paling bebas di antara sederet partai-partai yang jumlahnya tidak dibatasi, yang kesemuanya berkampanye dengan penuh antusias.

Pemilihan umum tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan dan kejutan. Jumlah partai lebih bertambah banyak daripada berkurang, dengan dua puluh delapan partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya dua puluh partai yang mendapat kursi. Akan tetapi, hanya empat partai yang mendapat lebih dari delapan kursi yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.

². C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1993).hlm. 195.

Pemilihan umum itu tidak menghasilkan penyelesaian untuk kesulitan-kesulitan sistem parlementer dan oleh karenanya merupakan langkah lebih lanjut dalam mendiskreditkan keseluruhan sistem itu. Persoalan politik pun tidak terselesaikan dengan pemilihan umum tersebut tetapi hanya membantu garis-garis perjuangan secara lebih jelas.³

Pada bulan Agustus 1956 ketegangan politik memuncak di Jakarta. Terjadi suatu jalan buntu politik dikarenakan banyak orang yang merasakan bahwa sistem konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi tetapi tidak mengetahui apa yang harus menyusul untuk menutupi persoalan tersebut. Beberapa kalangan menginginkan sebuah susunan kabinet Hatta yang baru, tetapi kini kerjasama lama antara Sukarno dan Hatta telah berakhir. Pada tanggal 20 Juli 1956 Hatta mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden, yang akan mulai berlaku 1 Desember 1956.

Pada pidato Sukarno tanggal 28 Oktober 1956 meminta agar partai-partai dibubarkan. Dua hari kemudian dia menyatakan bahwa dia memiliki suatu gagasan suatu sistem pemerintahan yang baru yaitu “Demokrasi Terpimpin”. Dari gagasan Soekarno tersebut lahir sebuah pertentangan dan dukungan, seperti pertentangan dari Natsir dan para pemimpin Masyumi lainnya. Murba sendiri selaku partai yang kurang memiliki kekuasaan di parlementer mendukung gagasan tersebut dan membuat ikatan yang lebih erat dengan Sukarno.

³. M.C Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 377-378.

Pada masa transisi dari tahun 1956-1957 terjadi pertikaian dari kalangan militer hingga partai politik, hingga pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno mengusulkan bahwa demokrasi terpimpinnya yang baru merupakan suatu bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional. Pemerintahan tersebut didasarkan oleh “kabinet gotong-royong” yang terdiri dari partai-partai besar, termasuk PKI yang akan mendapat nasihat-nasihat dari Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional (pemuda, kaum buruh, kaum tani, kelompok agama, kelompok daerah dan lain-lain) bukannya dari partai politik. Akan tetapi, tidak ada pengusulan penghapusan parlemen. Gagasan tentang kabinet Hatta, satunya-satunya langkah yang mungkin akan meredakan gerakan-gerakan protes daerah, nyata-nyata tidak terpikirkan oleh Sukarno.

Sementara demonstrasi-demonstrasi massa mendukung gagasan-gagasan Soekarno, maka krisis regional semakin bertambah serius. Pada tanggal 8 Maret 1957 panglima untuk Indonesia Timur yaitu Letnan Kolonel H.N.V Sumual mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayahnya dari markas besarnya di Makassar (Ujung Pandang), sehingga dengan demikian secara teoritis dia mengambil alih semua kekuasaan sipil dari Bali sampai Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Kemudian suatu “Piagam Perjuangan Semesta Alam” di proklamirkan dibacakan kepada para perwira Sumual, yang berikrar akan menyelesaikan Revolusi Indonesia.⁴

⁴. Ibid., hlm. 385.

Meskipun sistem politik sampai tahun 1957 tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Indonesia merupakan negara Tunggal. Bahkan gerakan-gerakan daerah yang tidak setuju dengan Jakarta dan Darul Islam pun tidak mempersoalkan kerumitan politik yang terjadi melainkan mereka berpandangan bahwa gerakan-gerakan tersebut hanya berusaha untuk memprotes cara pemerintah membentuk dan mengatur negara bukan eksistensinya.⁵

Dengan rentetan persoalan diatas, sangat memberikan penjelasan bahwa dalam tubuh militer di Indonesia juga mengalami pergolakan. Hal ini lah pula yang turut memberi warna dalam dunia perpolitikan di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sebelum diproklamirkannya Piagam Permesta 1957. Tidak hanya berasal dari Partai pergolakan politik ini mencuat, tetapi juga dari aspek-aspek lain sesuai penjelasan diatas.

2.2 Tokoh-Tokoh Yang Terlibat Dalam Permesta

Gerakan yang diharapkan membawa sebuah perubahan situasi dari kondisi yang sekiranya kurang ideal menjadi lebih baik tentu terdapat tokoh-tokoh atau aktor-aktor di dalamnya. Aktor-aktor inilah yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan perubahan atau merevolusi kondisi sebuah lingkungan atau skala lebih besarnya daerah.

Kepentingan-kepentingan yang hadir sebelum lahirnya gerakan Permesta sangat kompleks. Dimulai dari aspek pendidikan, ekonomi, sarana umum, dan

⁵. Ibid., hlm. 386.

masih banyak fasilitas-fasilitas yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan sebuah daerah.

Gerakan Permesta diinisiasi oleh beberapa tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam keberjalanannya, tentu peran serta gagasan-gagasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut yang kemudian menjadi landasan dari hadirnya gerakan Permesta. Adapun beberapa tokoh yang penulis maksudkan adalah :

2.2.1 Herman Nicholas Ventje Sumual

Dilahirkan di Remboken, di pantai Danau Tondano di Minahasa, pada tanggal 11 Juni 1923. Sumual inilah yang kemudian menjadi kepala dari gerakan Permesta dan sekaligus orang yang memindahkan pusat gerakan Permesta ke Sulawesi Utara, Kinilow. Selama masa pemindahan gerakan Permesta dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara, Sumual menjadi tokoh perwakilan di tiap-tiap perundingan yang dilakukan oleh Permesta dalam membangun gerakannya. Segala bentuk keputusan yang lahir dari Permesta sendiri sepenuhnya dikendalikan oleh Sumual. Sumual dalam periode 1958 hingga berakhirnya pergerakan Permesta pada tahun 1961 selalu mencoba untuk menjaga agar gerakan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, semua itu dilakukan agar tuntutan yang ada dalam gerakan ini kemudian didengarkan oleh pemerintah pusat. Sumual juga

menjadi orang yang paling terakhir dalam menyerahkan diri pada waktu berakhirnya gerakan Permesta tepat pada tanggal 20 Oktober 1961.⁶

2.2.2 Mohammad Saleh Lahade,

dilahirkan di Barru, Sulawesi Selatan. Saleh Lahade merupakan tokoh utama perancang proklamasi Permesta 2 Maret dan dijadikan kepala staf pemerintah militer Permesta pada bulan maret 1957. Peran yang dilakukan oleh Saleh Lahade dalam masa pergerakan ini sangat banyak, dalam setiap-setiap perancangan yang dibuat oleh Permesta itu berasal dari tokoh ini. Konsep-konsep pergerakan Permesta yang dibentuk ini berangkat dari komite yang dikepalai langsung oleh Saleh Lahade. Saleh Lahade juga menjadi tokoh sentral di Permesta selama masa berjalannya dikarenakan segala bentuk rencana pembangunan Permesta itu banyak dirancang oleh Saleh Lahade. Beliau kemudian ditangkap pada bulan Mei 1958 beliau ditangkap atas keterlibatannya dengan PRRI. Ditangkapnya Saleh Lahade membawa pengaruh besar dalam jalannya gerakan Permesta, segala perencanaan pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya itu gagal, hilangnya sosok Saleh Lahade dalam Permesta berarti hilangnya sosok pemikir dalam gerakan Permesta.⁷

⁶. Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Jakarta Graffiti Press, 1983), hlm.212-213.

⁷. Barbara Sillars Harvey, *op.cit.*, 1983, hlm. 207.

2.2.3 Andi Pangerang Pettarani

Andi Pangerang Pettarani merupakan putra tertua dari Andi Mappanyukki, raja Bone yang terakhir. Andi Pangerang merupakan Gubernur Sulawesi yang diangkat pada tanggal 12 Juli 1956. Andi Pangerang juga turut dalam penandatanganan proklamasi Permesta, ia kemudian diangkat menjadi gubernur militer Sulawesi Selatan oleh pemerintahan militer Permesta. Andi Pangerang secara resmi ditempatkan pada kedudukan tersebut pada tanggal 1 April 1957 dan diberi pangkat kolonel titular TNI. Selama masa pergerakan Permesta peran dari Andi Pangerang Pettarani hanya banyak di awal-awal pergerakan. Pasca pindahannya gerakan permesta pada bulan Juni 1957 menjadi satu perubahan sikap dari Andi Pangerang Pettarani. Karena selama masa pasca pemindahan tersebut banyak kebijakan yang lahir diluar dari sepengetahuan Andi Pangerang. Hal tersebut kemudian membawa ketersinggungan dalam gerakan Permesta sesama tokohnya. Hingga pada masa pindahannya gerakan tersebut menjadi tolak balik dari Andi Pangerang terhadap gerakan Permesta, yakni tidak bersepakat dengan segala bentuk atau kebijakan yang lahir dari gerakan tersebut.⁸

⁸. Barbara Sillars Harvey, *op.cit.*, 1983, hlm. 210.

2.2.4 Andi Muhammad Jusuf Amir

Dilahirkan di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1928. Ayahnya Raja Kajuara; selama masa revolusi ia beristrikan seorang ningrat Yogyakarta; kemudian ia menikah dengan Elly Saelan yang dilahirkan di Makassar, hasil perkawinan campuran Jawa dan Madura. Jusuf mengenyam pendidikan di HIS Watampone. Selama masa revolusi ia berada bersama satuan-satuan Sulawesi di Yogyakarta, berdinan sebagai ajudan Kahar Muzakkar. Pada bulan desember 1949, sebagai seorang kapten polisi militer (CPM) ia diangkat menjadi anggota staf Komisi Militer untuk Indonesia Timur. Beliau banyak berperan dalam dunia militer di Indonesia, pencapaian demi pencapaian beliau raih dalam militer Indonesia. Hingga pada tahun 1956 ia diangkat menjadi KRU yang baru saja dibentuk (kemudian menjadi RI) Hasanuddin pada bulan Oktober 1956. Andi Muhammad Jusuf Amir turut serta dalam penandatanganan proklamasi Permesta 2 Maret, tetapi beliau tidak memiliki jabatan sentral dalam gerakan Permesta. Namun selama masa pergerakan Permesta jabatan beliau terus meningkat mulai dari Januari 1958 pangkat beliau dinaikkan menjadi letnan kolonel , dan pada bulan Februari 1959 dia dijadikan kepala staf, dan pada bulan Oktober 1959 ia menjabat sebagai komandan KDM-SST. Selama masa pergerakan Permesta pasca pemindahannya, Jusuf dinilai sebagai tokoh yang membelot dari gerakan Permesta, hal tersebut bukannya tanpa alasan melainkan beliau tidak bersepakat bahwa Permesta dijalankan dengan jalur peperangan. Perbedaan pandangan itulah yang kemudian

menjadi salah satu faktor pemecah dari gerakan Permesta. Pasca pemindahan permesta ke Sulawesi Utara, Jusuf murni tidak melibatkan diri lagi dalam perencanaan-perencanaan Permesta.⁹

2.2.5 Alex Evert Kawilarang

Dilahirkan pada 23 Januari 1920 di Jatinegara, Jawa Barat. Ia berpendidikan HBS, kemudian akademi KNIL di Bandung, menjadi anggota angkatan 1940. Pada waktu masa revolusi dimulai ia anggota KRIS di Karawang, kemudian menjadi perwira staf di markas korps tentara Jawa Barat dari tahun 1946 sampai tahun 1948. Kiprahnya cukup cemerlang di militer hingga pada tahun 1960 ia tergabung dalam gerakan Permesta masa peperangan dan menjadi pimpinan pasukan Permesta di Minahasa Utara pada bulan November 1960. Setelah perundingan Permesta dengan TNI pada bulan April 1961 ia ditempatkan dalam kedudukan yang tidak aktif. Peran aktif Kawilarang ini membawa pengaruh besar terhadap pergolakan pasukan Permesta di Sulawesi Utara pada masa tersebut.¹⁰

2.2.6 Henk Rondonuwu

Dilahirkan pada tanggal 9 September 1910 di Tondano, Minahasa. Pada masa revolusi ia merupakan seorang pendiri Pusat Keselamatan Rakyat dan pendiri surat kabar pro-Republik Pedoman Rakjat, tempat ia kemudian menjadi redaktur utama. Ia menjadi Menteri penerangan dalam kabinet Putuhena tahun 1950 yang kemudian melaksanakan pembubaran

⁹. Barbara Sillars Harvey, op.cit., 1983, hlm.206.

¹⁰. *Ibid.*, hlm.206.

NIT dan memasukkan kembali Indonesia Timur kedalam Republik Kesatuan. Pada tahun 1957 ia merupakan salah seorang peserta sipil yang terpenting dalam gerakan Permesta, sebagai anggota Komite Eksekutif Dewan Penasihat Pusat Permesta, ketua Kongres Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagai anggota Dewan Tertinggi Permesta yang dibentuk pada bulan November 1957. Ia terlibat aktif dalam pergerakan Permesta dari aspek politik, beliau mempunyai kekuatan untuk menghimpun masyarakat sipil guna menggalakkan gerakan Permesta di pra-proklamasinya hingga pasca proklamasi Permesta.¹¹

Beberapa tokoh inilah yang menurut penulis memiliki peran penting dalam berjalannya gerakan Permesta di Sulawesi Selatan. Dalam paparan pengenalan tokoh diatas penulis memberikan sedikit gambaran peran serta konflik apa yang dibawah dari setiap tokoh yang diperkenalkan. Tentu peran serta konflik yang digambarkan di atas akan membawa pengaruh besar dalam berjalannya gerakan Permesta. Jelasnya akan tergambarkan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam penulisan ini.

¹¹. Barbara Sillars Harvey, *op.cit.*, 1983, hlm.211.